

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah S.W.T, karena atas Perkenan dan Rahmat-Nya, Rencana Strategik (*RENSTRA*) Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung Tahun 2013–2018 telah selesai disusun dalam bentuk dokumen.

Rencana Strategik (*RENSTRA*) Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung merupakan penjabaran dari Tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (*RPJMD*) Kota Bandung Tahun 2013-2018 yang dilaksanakan sebagai media atau dasar pertanggung jawaban atas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi secara periodik dan melembaga.

Dalam penyusunan Rencana Strategik (*RENSTRA*) ini dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi seluruh aparatur dan stakeholder di Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung dalam pencapaian sasaran dan program dalam 5 (lima) Tahun kedepan. Peran serta dari seluruh potensi *stakeholder* Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung dalam rangka penyusunan Rencana Strategik ini sangat mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi.

Kami menyadari dokumen Rencana Strategik (*RENSTRA*) Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung ini masih jauh dari sempurna, meskipun didalam proses perumusan dan penyusunannya melibatkan Kelurahan yang ada di Lingkungan Pemerintah Kecamatan Cibeunying Kidul, oleh karenanya kami mengharapkan dari semua pihak yang berkepentingan memberikan masukan, baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju ke arah perbaikan selanjutnya.



Akhirnya dengan telah disusunnya Rencana Strategik (*RENSTRA*) tersebut besar harapan Pemerintah Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung untuk dapat mencapai target kinerja serta memberikan kontribusi bagi kemaslahatan unsur aparat pemerintah dan dapat menjadi acuan dalam pencapaian kinerja serta bermanfaat bagi seluruh unsur penyelenggara program dan kegiatan di Lingkungan Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung sebagaimana yang diharapkan dan dapat mendorong pencapaian Visi Misi Kota Bandung dalam rangka mewujudkan kesejahteraan warga dan masyarakat Kota Bandung.

Bandung, 20 Juni 2014

CAMAT CIBEUNYING KIDUL

Drs. Denny Sany, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650810 198603 1 24

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | 3 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan..... | 5 |
| 1.4 Kedudukan dan Peranan Renstra Dalam Perencanaan Daerah | 6 |
| 1.5 Sistematika Penulisan | 7 |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL KOTA BANDUNG | 9 |
| 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung..... | 9 |
| 2.1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung | 9 |
| 2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung | 11 |
| 2.2 Sumber Daya Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung | 18 |
| 2.2.1 Sumber Daya Manusia | 18 |
| 2.2.2 Sarana dan Prasarana Kerja | 20 |
| 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung | 20 |
| 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan | 26 |
| 2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung | 29 |

| | | |
|----------------|---|-----------|
| BAB III | ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL KOTA BANDUNG | 30 |
| 3.1 | Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung ... | 30 |
| 3.2 | Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih..... | 36 |
| 3.3 | Telaahan Renstra Kementrian Dalam Negeri | 42 |
| 3.4 | Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis | 43 |
| 3.5 | Penentuan Isu-Isu Strategis Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung | 47 |
| BAB IV | VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL KOTA BANDUNG | 53 |
| 4.1 | Visi | 53 |
| 4.2 | Misi | 56 |
| 4.3 | Tujuan dan Sasaran | 58 |
| 4.4 | Stratategi dan Kebijakan SKPD | 66 |
| BAB V | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF | 71 |
| BAB VI | INDIKATOR KINERJA KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL KOTA BANDUNG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD | 90 |
| BAB VII | PENUTUP | 92 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja SKPD dalam kurun 5 (lima) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyusunan Renstra Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung tahun 2013-2018. Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra SKPD.

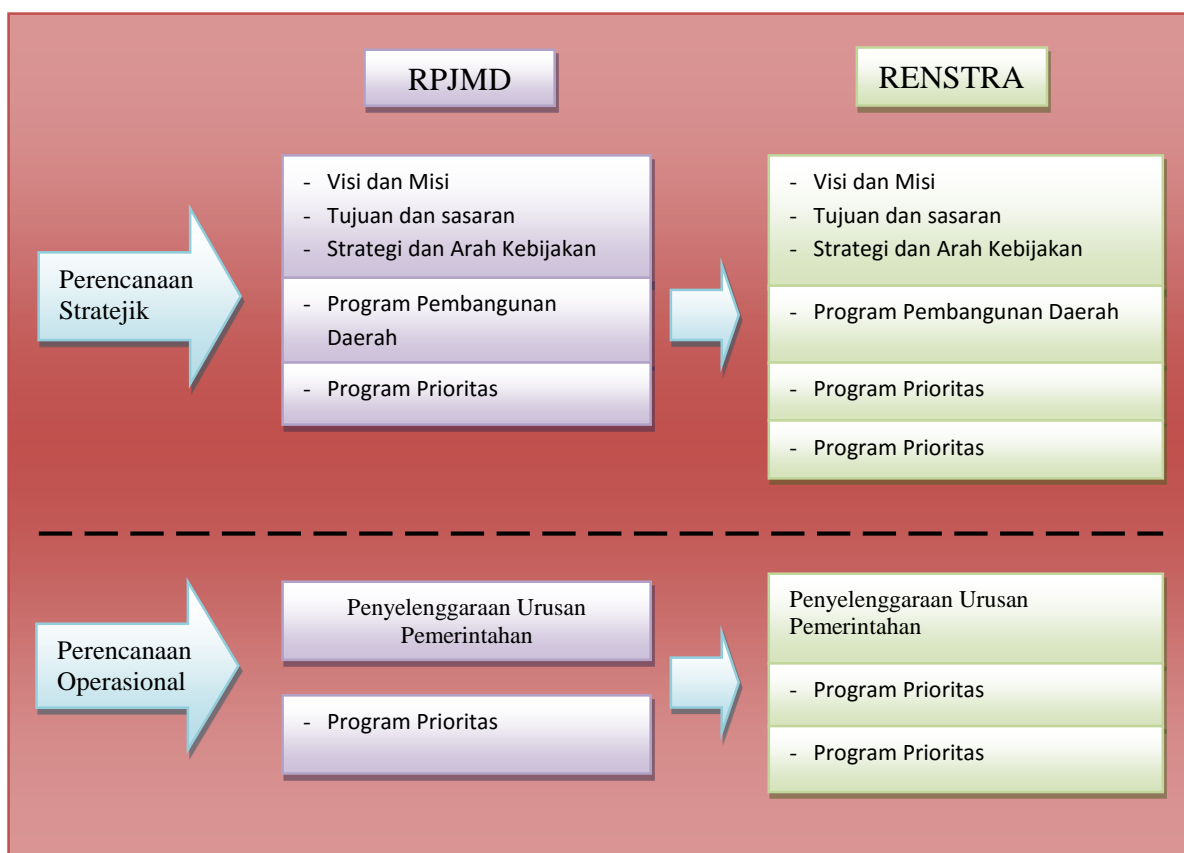
Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan tersebut dilaksanakan melalui adalah sebagai berikut;

- a. Tahapan persiapan penyusunan Renstra dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain: pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, Penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi.
- b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra SKPD; dan
- c. Tahapan penetapan Renstra SKPD

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh Camat Cibeunying Kidul selaku kepala SKPD, serta dibuat kesimpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Bappeda Kota Bandung.

Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah maka Renstra Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung 2013-2018 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kota Bandung tahun 2013-2018 dan Renja SKPD, ilustrasi keterhubungan Renstra SKPD dengan RPJMD dan Renja SKPD dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1
Ilustrasi Keterkaitan RPJMD



Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD, landasan hukum tersebut yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa tengah dan daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- e. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- f. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
- g. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- h. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah;
- i. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;



- j. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- k. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah;
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- s. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- t. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2000 tentang pengembangan dan Penataan Kawasan Inti Pusat Kota;
- u. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
- v. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

- w. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah
- x. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025;
- y. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2010-2030.
- z. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018;
- aa. Peraturan Walikota Bandung Nomor 250 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Organisasi Pada Kecamatan Dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang visi, misi, tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung tahun 2014–2018 adalah:

1. Menjamin keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Kecamatan Cibeunying Kidul, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Pemerintah Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung.
2. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi seluruh Kelurahan di lingkungan Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan

diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kota Bandung, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur di lingkungan Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
4. Memudahkan seluruh jajaran pada masing-masing Kelurahan di Lingkungan Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.

1.4. Kedudukan dan Peranan Rensta Dalam Perencanaan Daerah.

Perencanaan Strategis Kecamatan Cibeunying Kidul merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan daerah, khususnya pasal 19 ayat (3) menyatakan, bahwa Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih harus membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 3 (tiga) bulan setelah pelantikan yang selanjutnya digunakan sebagai Pedoman Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah maupun laporan Penyelenggaraan Pemerintahan ke Presiden. Rencana Strategis Kecamatan Cibeunying Kidul bersama rencana strategis SKPD lainnya merupakan bagian yang utuh dari rencana Strategis Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung. Rencana Strategis Kecamatan Cibeunying Kidul mengandung visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, sehingga Rencana Strategis ini berperan sebagai

pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan umum demi tercapainya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kecamatan Cibeunying Kidul.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategik (Renstra) Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan susunannya adalah, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan membahas secara ringkas mengenai pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, dan keterkaitan renstra dengan RKT dan Renja.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL KOTA BANDUNG

Gambaran Pelayanan Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung memuat penjelasan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL KOTA BANDUNG

Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi memuat penjelasan mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL KOTA BANDUNG

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan memuat penjelasan mengenai Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, Strategi dan Kebijakan dalam mencapai misi yang telah ditetapkan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif, membahas mengenai penjelasan tentang program-program dan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai target sesuai indikator yang telah ditetapkan selama lima tahun secara bertahap serta jumlah dana yang dibutuhkan

BAB VI INDIKATOR KINERJA KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL KOTA BANDUNG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD, memuat mengenai indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL KOTA BANDUNG

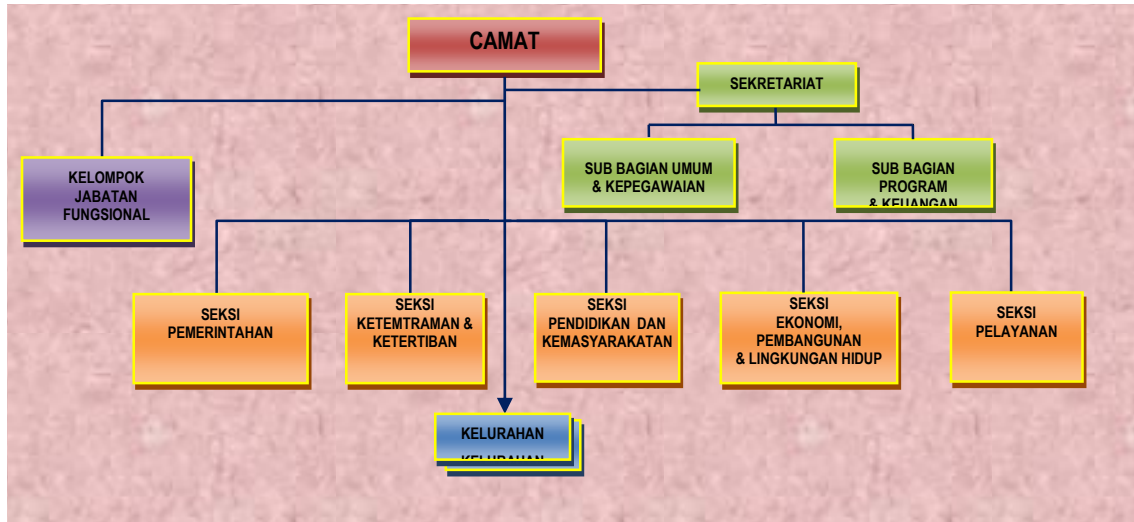
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung

2.1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, susunan Kecamatan Organisasi Cibeunying Kidul Kota Bandung terdiri atas:

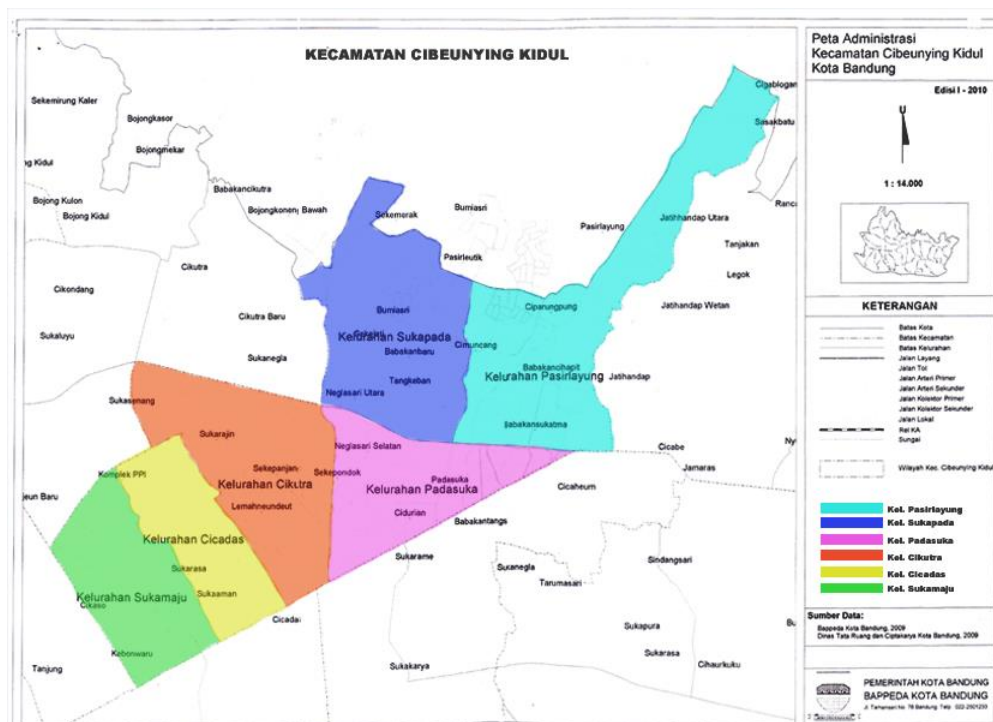
- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan;
- f. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
- g. Seksi Pelayanan;
- h. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- i. Sub Bagian Program dan Keuangan;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Kecamatan



Sumber: Perda Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007

Gambar 2.2
PETA WILAYAH KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL



2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Kedudukan Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya, Kecamatan Cibeunying Kidul mempunyai fungsisebagai berikut:

- a) mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b) mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c) mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d) mengkoordinasikan pemerliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e) mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- f) membina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;
- g) melaksanakan pelayanan ketatausahaan Kecamatan.
- h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Sedangkan uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 250 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Organisasi Pada Kecamatan Dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, sebagai berikut:

- 1) Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok, Camat mempunyai fungsi:
 - a. mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengkoordinasikan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. membina pemerintahan kelurahan di wilayah kerjanya.
- 2) Sekretaris Kecamatan; mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang kesekretariatan. Untuk melaksanakan tugas pokok Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana program kegiatan kecamatan;
 - b. pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan kecamatan dan kelurahan;
 - c. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan;
 - d. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Seksi;
 - e. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan Kecamatan dengan Instansi terkait dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian administrative kegiatan kesekretariatan dan kecamatan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- 3) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang pemerintahan, untuk melaksanakan tugas pokok Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan data dan materi bahan lingkup pemerintahan;
 - b. pembinaan Rukun Warga dan Rukun Tetangga;

- c. pelayanan administrasi pertanahan;
 - d. pembinaan administrasi pemerintahan Kelurahan;
 - e. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan pemerintahan dengan Instansi terkait; dan
 - f. pelaporan pelaksanaan lingkup pemerintahan.
- 4) Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang ketentraman dan ketertiban, untuk melaksanakan tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:
- a. penyusunan data dan bahan materi lingkup ketentraman dan ketertiban;
 - b. pembinaan ketentraman dan ketertiban;
 - c. pembinaan potensi perlindungan masyarakat;
 - d. pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana;
 - e. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan ketentraman dan ketertiban dengan Instansi terkait; dan
 - f. pelaporan pelaksanaan lingkup ketentraman dan ketertiban.
- 5) Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang pendidikan dan kemasyarakatan, untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan data dan bahan materi lingkup pendidikan dan kemasyarakatan;
 - b. inventarisasi dan fasilitasi masalah sosial kemasyarakatan;
 - c. inventarisasi potensi bidang pendidikan formal dan informal;
 - d. pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
 - e. fasilitasi pembinaan bidang keagamaan, ketahanan keluarga, partisipasi dan pemberdayaan perempuan serta generasi muda;

- f. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan bidang pendidikan dan kemasyarakatan dengan Instansi terkait; dan
 - g. pelaporan pelaksanaan lingkup bidang pendidikan dan kemasyarakatan
- 6) Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup, untuk melaksanakan tugas pokok Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
- a. penyusunan data dan bahan materi lingkup ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup;
 - b. fasilitasi pembinaan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
 - c. inventarisasi potensi ekonomi masyarakat dan pembangunan;
 - d. fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana fisik fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - e. fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup;
 - f. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan ekonomi dan ketahanan pangan, pembangunan, serta lingkungan hidup dengan Instansi terkait; dan
 - g. pelaporan pelaksanaan lingkup ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup.
- 7) Seksi Pelayanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang pelayanan, untuk melaksanakan tugas pokok Seksi Pelayanan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan data dan bahan materi lingkup pelayanan;
 - b. pelayanan data dan informasi Kecamatan;
 - c. pelayanan administrasi kependudukan;
 - d. pelayanan administrasi umum lainnya;
 - e. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan pelayanan dengan Instansi Terkait; dan

- f. pelaporan pelaksanaan lingkup pelayanan.
- 8) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Kecamatan di bidang umum dan kepegawaian, untuk melaksanakan tugas pokok Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
- a. penyusunan bahan rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan Kecamatan, penyelenggaraan kerumahtanggaan Kecamatan, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas, serta pelaksanaan administrasi kepegawaian; dan
 - c. pelaporan kegiatan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.
- 9) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Kecamatan di bidang keuangan dan program, untuk melaksanakan tugas pokok Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan dan program kerja Kecamatan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan anggaran, koordinasi pengelola dan pengendalian keuangan dan menyusun laporan keuangan Kecamatan;
 - c. pelaksanaan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program serta koordinasi pengendalian program serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja kecamatan; dan
 - d. pengkoordinasian pelaporan lingkup kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan program kerja Kecamatan.

- 10) Lurah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilimpahkan Walikota kepada Lurah, dalam melaksanakan tugas pokok Lurah mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
 - b. pemberdayaan masyarakat, perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
 - c. pelayanan masyarakat;
 - d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. pemeliharaan prasarana, fasilitas pelayanan umum dan lingkungan hidup; dan
 - f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.
- 11) Sekretaris Lurah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Lurah di bidang kesekretariatan, untuk melaksanakan tugas pokok Sekretaris Lurah mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan data dan bahan materi lingkup kesekretariatan Kelurahan;
 - b. penyusunan rencana program dan kegiatan Kelurahan;
 - c. pengelolaan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian;
 - d. pengkoordinasian kegiatan seksi di Kelurahan;
 - e. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan Kelurahan dengan Instansi Terkait; dan
 - f. pelaporan pelaksanaan lingkup kesekretariatan dan Kelurahan.
- 12) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Lurah di bidang pemerintahan, untuk melaksanakan tugas pokok Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan data dan bahan materi lingkup pemerintahan;
 - b. fasilitasi penyelenggaraan pemilihan pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
 - c. pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan ketentraman dan ketertiban;
 - d. pembinaan ketentraman dan ketertiban;
 - e. pembinaan potensi perlindungan masyarakat;

- f. pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan pemerintahan dengan Instansi Terkait; dan
 - g. pelaporan pelaksanaan lingkup pemerintahan.
- 13) Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Lurah di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup, untuk melaksanakan tugas pokok Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
- a. penyusunan data dan materi bahan lingkup ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup;
 - b. fasilitasi pembinaan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - c. inventarisasi potensi ekonomi masyarakat dan pembangunan;
 - d. fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana fisik fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - e. fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup;
 - f. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup dengan Instansi terkait; dan
 - g. pelaporan pelaksanaan lingkup ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup.
- 14) Seksi Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Lurah di bidang kemasyarakatan, untuk melaksanakan tugas pokok Seksi Kemasyarakatan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan data dan bahan materi lingkup kemasyarakatan;
 - b. inventarisasi potensi bidang kemasyarakatan;
 - c. inventarisasi dan Fasilitasi bidang pendidikan;
 - d. pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan di tingkat Kelurahan;
 - e. fasilitasi pembinaan bidang keagamaan, ketahanan keluarga, partisipasi dan pemberdayaan perempuan serta generasi muda;
 - f. pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana;

- g. inventarisasi dan fasilitasi ketahanan pangan;
 - h. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan bidang kemasyarakatan dengan Instansi terkait; dan
 - i. pelaporan pelaksanaan lingkup kemasyarakatan.
- 15) Seksi Pelayanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Lurah di bidang pelayanan, untuk melaksanakan tugas pokok Seksi Pelayanan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan data dan bahan materi lingkup pelayanan;
 - b. pelayanan data dan informasi Kelurahan;
 - c. pelayanan administrasi kependudukan;
 - d. pelayanan administrasi umum lainnya;
 - e. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan pelayanan dengan Instansi Terkait; dan
 - f. pelaporan pelaksanaan lingkup pelayanan.
- 16) Kelompok Jabatan Fungsional pada masing-masing Kecamatan dan Kelurahan terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Walikota atas usul Camat untuk Kecamatan dan Lurah untuk Kelurahan.
- Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

2.2 Sumber Daya Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung memiliki pegawai sebanyak 55 orang. Dari jumlah pegawai tersebut, disamping Camat sebanyak 13 orang (24%)

merupakan pegawai di Kecamatan Cibeunying Kidul, sebanyak 6 orang (11%) merupakan pegawai di Kelurahan Cikutra, sebanyak 7 orang (13 %) merupakan pegawai di Kelurahan Cicadas, sebanyak 8 orang (15%) merupakan pegawai di Kelurahan Padasuka, sebanyak 5 orang (9%) merupakan pegawai di Kelurahan Sukapada, sebanyak 8 orang (15%) merupakan pegawai di Kelurahan Pasirlayung, sebanyak 7 orang (13%) merupakan pegawai di Kelurahan Sukamaju.

Jumlah pegawai eselon III sebanyak 2 orang yaitu Camat dan Sekretaris Kecamatan, Eselon IVa sebanyak 11 orang yaitu 5 (lima) kepala Seksi dan 6 (enam) Lurah, Eselon IVb sebanyak 29 orang yaitu para kepala sub bagian pada Sekretariat Kecamatan dan Kasi pada Kelurahan. Pelaksana sebanyak 13 orang tersebar di kecamatan dan kelurahan. Rincian pegawai berdasarkan Eselon Jabatan dan Unit Kerja di lingkungan Kecamatan Cibeunying Kidul, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.1

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

| No | Uraian | Eselon I | Eselon II | Eselon IIIa | Eselon IIIb | Eselon IVa | Eselon IVb | Staf | Jumlah |
|----|-----------------------|----------|-----------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 1 | KECAMATAN | - | - | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 14 |
| 2 | KELURAHAN CICADAS | - | - | - | | 1 | 5 | 1 | 7 |
| 3 | KELURAHAN CIKUTRA | - | - | - | | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 4 | KELURAHAN PADASUKA | - | - | - | | 1 | 5 | 2 | 8 |
| 5 | KELURAHAN SUKAPADA | - | - | - | | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 6 | KELURAHAN PASIRLAYUNG | - | - | - | | 1 | 5 | 2 | 8 |
| 7 | KELURAHAN SUKAMAJU | - | - | - | | 1 | 5 | 1 | 6 |
| | JUMLAH | - | - | 1 | 1 | 11 | 29 | 13 | 55 |

Sumber: Kecamatan Cibeunying Kidul Tahun 2013

Tabel 2.2

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

| No | Uraian | S3 | S2 | S1 | D3 | SLTA | SLTP | SD | Jml |
|----|------------------|----|----------|-----------|----------|-----------|----------|----|-----------|
| 1 | KECAMATAN | - | 1 | 10 | 1 | 2 | - | - | 14 |
| 2 | KEL. CICADAS | - | 2 | 2 | - | 3 | - | - | 7 |
| 3 | KEL. CIKUTRA | - | 1 | 3 | - | 2 | - | - | 6 |
| 4 | KEL. PADASUKA | - | - | 4 | - | 4 | - | - | 8 |
| 5 | KEL. SUKAPADA | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 5 |
| 6 | KEL. PASIRLAYUNG | - | - | 3 | - | 4 | 1 | - | 8 |
| 7 | KEL.SUKAMAJU | - | - | 3 | - | 4 | - | - | 7 |
| | JUMLAH | - | 5 | 27 | 2 | 20 | 1 | - | 55 |
| | % | | 9,09 | 49,09 | 3,64 | 36,4 | 1,82 | - | - |

Sumber: Kecamatan Cibeunying Kidul Tahun 2013

Dari seluruh jumlah pegawai Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung, sebanyak 5 orang (9,09 %) memiliki pendidikan S2, sebanyak 27 orang (49,09 %) yang memiliki pendidikan S1, sebanyak 2 orang (3,64 %) yang memiliki pendidikan D3, sebanyak 20 orang (36,4 %) yang memiliki pendidikan SLTA, sebanyak 1 orang (1,82 %) yang memiliki pendidikan SLTP.

2.2.2. Sarana Dan Prasarana Kerja

Tersedianya sarana dan prasarana kerja akan menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung. Secara umum sarana dan prasarana sebagaimana terurai dalam lampiran.

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung

Tingkat capaian kinerja Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung berdasarkan sasaran/target Renstra Tahun 2009-2013 menurut indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya disajikan pada tabel berikut:



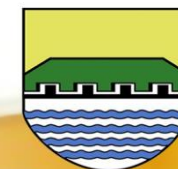
Tabel 2.3

**Riviu Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung
Tahun 2009-2013**

| NO | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan | Tar get IKK | Tar get Indi kator Lain nya | Target Renstra SKPD Tahun ke- | | | | | Realiasi SKPD Tahun ke - | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|----|--|--|-------------------|--|-------------------------------|------|------|-------|------|--------------------------|------|------|------|------|---------------------------------|---------|---------|---------|----------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Fasilitasi peningkat an pelayanan kepada masyarak at | Terfasilitasi ya kegiatan pembuatan KTP | | | 5800 | 6500 | 7500 | 10000 | 7200 | 5673 | 6235 | 6687 | 8221 | 3985 | 98 % | 96 % | 89 % | 82 % | 55 % |
| | | Terfasilitasi ya kegiatan pembuatan Kartu Keluarga | | | 7200 | 8000 | 8500 | 10000 | 2088 | 6342 | 7543 | 7784 | 8973 | 9250 | 88 % | 94 % | 92 % | 90 % | 44 3% |
| | | Terfasilitasi ya kegiatan pembuatan Surat Serbaguna, SKM, Surat Pindah dll | | | 1500 | 1800 | 2000 | 2000 | 7650 | 1300 | 1700 | 1500 | 1578 | 1865 | 87 % | 94 % | 75 % | 79 % | 24 % |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 2 | Fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat Kecamatan dan Kelurahan | Terbinanya Koperasi | | | 6 | 12 | 16 | 25 | 28 | 6 | 9 | 12 | 19 | 20 | 100% | 75% | 75% | 76% | 71% |
| | | Terbinanya UKM produk unggulan | | | 6 | 12 | 16 | 17 | 22 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 100% | 67% | 63% | 76% | 68% |
| | | Terfasilitasinya kegiatan PNPB | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3 | Peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Terselenggaranya kegiatan penanaman pohon | | | 15650 | 16250 | 16850 | 17600 | 19360 | 15650 | 16250 | 16850 | 17600 | 17900 | 100% | 100% | 100% | 100% | 92% |
| | | Terselenggaranya kegiatan sosialisasi tentang lingkungan hidup | | | 6 | 7 | 8 | 12 | 12 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% |
| | | Terselenggaranya musrenbang tingkat kecamatan dan kelurahan | | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 4 | Fasilitasi Peningkatan kualitas kehidupan kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan | Terbinanya PKK dan Dharma Wanita Persatuan Kecamatan Cibeunying Kidul | | | 1772 | 1772 | 1773 | 1775 | 1775 | 1595 | 1595 | 1559 | 1557 | 1592 | 90 % | 90 % | 88 % | 88 % | 90 % | |
| | | Terselenggaranya pertemuan rutin TP PKK dan Dharma Wanita Persatuan Kecamatan Cibeunying Kidul | | | 6 Kelurahan, 12 kali/t hn, | 6 Kelurahan, 12 kali/t hn, | 6 Kelurahan, 12 kali/t hn, | 6 Kelurahan, 12 kali/t hn, | 6 Kelurahan, 12 kali/t hn, | 6 Kelurahan, 12 kali/t hn, | 6 Kelurahan, 12 kali/t hn, | 6 Kelurahan, 12 kali/t hn, | 6 Kelurahan, 12 kali/t hn, | 6 Kelurahan, 12 kali/t hn, | 6 Kelurahan, 12 kali/t hn, | 10 0% | 10 0% | 10 0% | 10 0% | 10 0% |
| | | Terfasilitasinya kegiatan organisasi kemasyarakatan | | | 6 Kelurahan, 12 kali/t hn, | 6 Kelurahan, 12 kali/t hn, | 6 Kelurahan, 12 kali/t hn, | 6 Kelurahan, 10 Lembaga Kemasyarakatan | 6 Kelurahan, 12 kali/t hn, | 6 Kelurahan, 12 kali/t hn, | 6 Kelurahan, 12 kali/t hn, | 6 Kelurahan, 12 kali/t hn, | 6 Kelurahan, 12 kali/t hn, | 6 Kelurahan, 10 Lembaga Kemasyarakatan | 6 Kelurahan, 12 kali/t hn, | 10 0% | 10 0% | 10 0% | 10 0% | 10 0% |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| 5 | Fasilitasi peningkatan pemerintahan umum Kecamatan dan Kelurahan | Terbinanya para ketua RW dan RT dalam penyeragaman administrasi | | | 16 | 14 | 20 | 19 | 18 | 16 | 12 | 20 | 21 | 18 | 100% | 86% | 100% | 111% | 100% | |
| | | Tersedianya data tipologi kecamatan Cibeunying Kidul | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Terselenggaranya kegiatan pembinaan dan perlombaan kelurahan | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6 | Peningkatan kualitas penanganan Ketentraman dan ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Terselenggaranya sosialisasi dan Penegakan Perda K3 | | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | | Terbinanya anggota linmas | | | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 530 | 530 | 532 | 428 | 479 | 99% | 99% | 99% | 80% | 90% | |
| | | Terbinanya anggota satwankar | | | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 90 | 98 | 95 | 80 | 150 | 107% | 117% | 113% | 95% | 179% | |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|
| | Tersedianya Data Daerah Rawan Bencana Kecamatan Cibeunying Kidul | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Terselenggaranya kegiatan Opsih | | | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 20 | 23 | 24 | 24 | 92% | 83% | 96% | 100% | 100% |
| | Terfasilitasinya kegiatan adipura | | | 6 kel | 6 kel | 6 kel | 6 kel | 6 kel | 6 kel | 6 kel | 6 kel | 6 kel | 6 kel | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Tertatanya PKL di lingkungan kecamatan | | | 1261 | 1261 | 1261 | 1261 | 1261 | 1100 | 1000 | 900 | 700 | 914 | 87% | 79% | 71% | 56% | 72% |

2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung, sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan di samping juga sumber daya manusia dan sarana prasarana. Pada tahun 2013 anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4
Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung
Tahun 2013

| Uraian | Anggaran | Realisasi |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Belanja | 10.264.516.878,30 | 9.709.729.091,00 |
| - Belanja Tidak Langsung | 5.050.789.467,30 | 4.790.487.553,00 |
| - Belanja Langsung | 5.213.727.411,00 | 4.919.241.538,00 |
| Bertambah/ (Berkurang) | - | - |

Sumber: Kecamatan Cibeunying Kidul

Realisasi keuangan Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung pada tahun anggaran 2013 untuk belanja sebesar Rp. **9.709.729.091,00,-** yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.790.487.553,00,- (94,85%) dan belanja langsung sebesar Rp. 4.919.241.538,00,- (94,35%) dari total anggaran Rp. **10.264.516.878,30**

Untuk periode pelayanan Tahun 2009-2013 kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung,

anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.5
Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung
Tahun 2009-2013

| Uraian | Anggaran | Realisasi |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Belanja | 33.893.360.900,41 | 32.413.885.470,00 |
| - Belanja Tidak Langsung | 20.021.236.337,20 | 19.551.176.221,00 |
| - Belanja Langsung | 13.872.124.563,21 | 12.862.709.249,00 |
| Bertambah/ (Berkurang) | - | - |

Sumber: Kecamatan Cibeunying Kidul

Realisasi keuangan Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung selama periode tahun anggaran 2009 sampai dengan tahun 2013 untuk belanja sebesar Rp. **32.413.885.470,00** yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 19.551.176.221,00 (97,65%) dan belanja langsung sebesar Rp. 12.862.709.249,00 (92,72%) dari total anggaran 2009 sampai dengan 2013 sebesar Rp. **33.893.360.900,41**

Secara lengkap anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung selama tahun 2009-2013 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung Tahun 2009-2013

| Uraian | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Anggaran | Realisasi |
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | |
| BELANJA | 5.619.757.652,00 | 5.308.872.790,00 | 6.104.468.679,00 | 6.595.744.901,11 | 10.264.516.878,30 | 5.500.278.616,00 | 5.214.959.219,00 | 5.632.859.863,00 | 6.356.058.681,00 | 9.709.729.091,00 | 97,87% | 98,23% | 92,27% | 96,37% | 94,60% | 14,63 % | 13,69 % |
| BELANJA TIDAK LANGSUNG | 3.244.032.652,00 | 3.423.261.790,00 | 3.994.461.679,00 | 4.308.690.748,90 | 5.050.789.467,30 | 3.201.323.775,00 | 3.410.545.264,00 | 3.894.886.091,00 | 4.253.933.538,00 | 4.790.487.553,00 | 98,68% | 99,63% | 97,51% | 98,73% | 94,85% | 9,46 % | 8,51 % |
| BELANJA LANGSUNG | 2.375.725.000,00 | 1.885.611.000,00 | 2.110.007.000,00 | 2.287.054.152,21 | 5.213.727.411,00 | 2.298.954.841,00 | 1.804.413.955,00 | 1.737.973.772,00 | 2.102.125.143,00 | 4.919.241.538,00 | 96,77% | 95,69% | 82,37% | 91,91% | 94,35% | 25,53 % | 25,95 % |

2.5 Tantangan dan Peluang Kecamatan Cibeunying Kidul

Secara umum terdapat beberapa permasalahan di Kecamatan Cibeunying Kidul yang meliputi masalah pelayanan publik, masalah internal organisasi / Unit Kerja dan masalah perwilayahan yang perlu mendapat perhatian pemerintah dan semua pihak, secara rinci permasalahan tersebut sebagai berikut :

1. Pelayanan Publik :
 - a. Masih adanya sebagian masyarakat yang belum mampu memperoleh pelayanan kesehatan secara layak.
 - b. Masih adanya sebagian masyarakat yang masuk dalam kategori keluarga miskin.
 - c. Masih tingginya angka pengangguran karena masih rendahnya tingkat keterampilan.
 - d. Belum optimalnya jalinan kemitraan antara usaha kecil, menengah dan dan koperasi dengan usaha besar.
 - e. Masih rendahnya partisipasi dan kesadaran pentingnya K-3.
2. Internal Organisasi / Unit Kerja :
 - a. Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan kewenangan Walikota kepada Camat.
 - b. Belum memadainya sarana dan prasarana kantor.
 - c. Terbatasnya SDM Aparatur Kecamatan.
3. Perwilayahan :
 - a. Menurunnya kualitas dan kuantitas sumber lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kegiatan rumah tangga dan kegiatan usaha.
 - b. Kurang tertatanya sarana jalan, saluran dan air kotor.
 - c. Kurang tertatanya sarana pemukiman.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung yang berkaitan dengan Tugas Umum Pemerintahan dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Cibeunying Kidul, yaitu permasalahan pada tataran kebijakan, Program Kegiatan dan teknis operasional.

Pada tataran kebijakan Pemerintah Kecamatan Cibeunying Kidul dapat diidentifikasi permasalahan utama pelayanan Pemerintah Kecamatan Cibeunying Kidul sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya kualitas pelayanan Publik pada Kecamatan Cibeunying Kidul.
2. Belum optimalnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan ditandai dengan nilai AKIP Kecamatan Tahun 2012 sebesar 47,13
3. Kebijakan penetapan anggaran yang relatif lama dalam kaitan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sehingga berdampak pada mundurnya pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Cibeunying Kidul.

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Bagian/ Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kecamatan Cibeunying Kidul dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Pemerintah Kecamatan Cibeunying Kidul, sebagai berikut:

1. Belum optimalnya partisipasi lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain adalah belum terjalannya komunikasi yang efektif antara stakeholder dalam aktivitas partisipasi.
2. Belum optimalnya penyerapan swadaya murni dari masyarakat;
3. Belum optimalnya Perencanaan Strategis pada tingkat SKPD, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman dan wawasan tentang bagaimana membuat rencana strategis untuk SKPD tersebut selama kurun waktu 5 (lima) tahun;
4. Belum optimalnya penerapan SMM ISO 9001:2008;
5. Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah;
6. Belum optimalnya kapasitas aparatur kewilayahan, khususnya pemahaman tentang program dan kegiatan yang ada dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang bersangkutan;
7. Tingkat koordinasi antar lembaga kemasyarakatan dalam penanganan kebencanaan masih rendah;
8. Masih kurangnya pemahaman aparatur terhadap Pengadaan Barang dan Jasa (metode swakelola);

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Kecamatan Cibeunying Kidul, sebagai berikut

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Kecamatan dan Kelurahan terutama pada jajaran staf, sehingga tugas yang dibebankan seringkali *overload*.
2. Masih belum optimalnya pelaporan Kecamatan dan Kelurahan Program dan kegiatan kepada Pemerintah Kota Bandung
3. Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Cibeunying Kidul sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah adalah faktor internal dan eksternal Kecamatan Cibeunying Kidul, masalah internal yang mempengaruhi Pemerintah Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung antara lain:

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.
2. Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja.
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Pemerintah Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung adalah:

1. Adanya multi interpretasi terhadap pelimpahan kewenangan kepada Camat dan Lurah yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Pelimpahan kewenangan kepada Camat dan Lurah belum sepenuhnya didukung dengan Personil, Pembiayaan dan Prasarana.

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung dalam kurun waktu 2013-2018, adalah sebagai berikut:

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang

berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan public, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.

2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah

Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (*services excelent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal *public services and public complaint*. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan *good governance*. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai ‘pelayan masyarakat’. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Cibeunying Kidul dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (*public service reform*) dalam rangka mewujudkan good governance.

3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsure pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat umum sebagai *stakeholder*, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai *shareholder*.

Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali

pembinaan pegawai, memperbaiki *reward and punishment system*, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

4. Pengelolaan Keuangan dan Barang

Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada *entrepreneurial management* yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (*Performance Budget*), bukan pada kebijakan (*Policy Budget*).

Sistem manajemen keuangan daerah (*financial management system*) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya *good governance* di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep *value for money* sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*).

Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu: perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah: (1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah

dan sistem pelaporan; (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah; (3) Pengamanan barang daerah; (4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kota Bandung tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013 – 2018 yaitu:

**“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG
UNGGUL, NYAMAN, DAN SEJAHTERA”**

Penjabaran Visi tersebut adalah sebagai berikut:

Bandung : meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Bandung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1811 hingga sekarang;

Unggul : menjadi yang terbaik dan terdepan dengan mempertahankan pencapaian sebelumnya serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyamanan dan kesejahteraan warga Kota Bandung;

Nyaman : terciptanya suatu kondisi dimana kualitas lingkungan terpelihara dengan baik melalui sinergitas lintas sektor

sehingga dapat memberikan kesegaran dan kesejukan bagi penghuninya. Kota yang nyaman adalah suatu kondisi dimana berbagai kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air, dan udara terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali serta ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya responsif terhadap berbagai aktivitas dan perilaku penghuninya;

Sejahtera : mengarahkan pembangunan kota pada pemenuhan kebutuhan lahir dan batin melalui peningkatan partisipasi dan kerjasama seluruh lapisan masyarakat, agar dapat memfungsikan diri sebagai hamba dan wakil Tuhan di bumi. Kesejahteraan yang ingin diwujudkan merupakan kesejahteraan yang berbasis pada ketahanan keluarga dan lingkungan sebagai dasar pengokohan sosial. Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materisaja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya, meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan yang seperti inilah yang akan membentuk kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik, hingga menjaditeladan bagi kota lainnya.

Misi Kota Bandung Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari Misi Tahap III dalam RPJPD Kota Bandung 2005-2025 dan integrasi dari sasaran yang akan dicapai pada Misi Tahap III tersebut. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi. Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan misi ini adalah: **Manusia yang berdaya saing, ekonomi kokoh, tata kelola pemerintah yang baik, infrastruktur berkelanjutan, serta kokohnya interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan Kota Bandung.** Kelima hal ini merupakan bidang garapan besar yang akan menjadi sebuah panduan dalam bagaimana memandang pembangunan di Kota Bandung. Adapun Misi tersebut terdiri dari:

1. Menata Kota Bandung melalui penataan ruang, pembangunan infrastruktur, dan fasilitas publik yang berkelanjutan (*sustainable*) dan nyaman.
2. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani.
3. Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing.
4. Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan.

Hal penting yang tercantum dalam RPJMD Kota Bandung 2013-2018 adalah janji-janji politik selama masa kampanye dari Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang akan dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1

Janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

| No. | Aspek | Indikator |
|-----|--------------------------|--|
| 1 | BANDUNG SEHAT | <ol style="list-style-type: none"> 1. Asuransi Kesehatan 2. <i>Ambulance</i> gratis 3. Puskesmas gratis dan pelayanan 24 jam |
| 2 | BANDUNG RESIK | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bebas Sampah dalam 2 Tahun 2. Bebas Banjir dalam 3 Tahun 3. Jalan Mulus dan Caang dalam 3 Tahun 4. Bebas Macet dalam 4 Tahun |
| 3 | BANDUNG NYAMAN | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana olahraga/taman bermain di setiap RW 2. Penyediaan sarana air bersih 3. Perbaikan 10.000 rumah tidak layak huni 4. Bantuan 100 juta/RW/tahun 5. Bantuan 100 juta PKK/kelurahan/tahun 6. Bantuan 100 juta/karang taruna kelurahan/tahun |
| 4 | BANDUNG SEJAHTERA | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menciptakan 100.000 wirausahawan 2. Menciptakan 250.000 lapangan pekerjaan baru 3. Bantuan 100.000 beasiswa untuk siswa SD, SMP, SMU dan mahasiswa per tahun 4. Bantuan keuangan untuk guru honorer, guru madrasah, dan tempat ibadah 5. Subsidi Harga sembako dan gas 3 kg 6. Santunan Kematian Rp. 2 juta/jiwa |

Sumber: *Bappeda Kota Bandung 2013*

Gambar 3.1

Janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Bandung Resik

Bebas Sampah: 2 thn

Bebas Banjir: 3 thn

Jalan Mulus & Caang: 3 thn

Bebas Macet: 4 thn



Bandung Sehat

- Asuransi Kesehatan
- Ambulance gratis
- Puskesmas gratis dan pelayanan 24 jam

Bandung Nyaman

- Sarana olahraga/taman bermain di setiap RW
- Penyediaan sarana air bersih
- Perbaikan 10.000 rumah tidak layak huni
- Bantuan 100 juta/RW/tahun
- Bantuan 100 juta PKK/kelurahan/tahun
- Bantuan 100 juta/karang taruna kelurahan/tahun

Bandung Sejahtera

- Menciptakan 100.000 wirausahawan
- Menciptakan 250.000 lapangan pekerjaan baru
- Bantuan 100.000 beasiswa untuk siswa SD, SMP, SMU dan mahasiswa per tahun
- Bantuan keuangan untuk guru honorer, guru madrasah, dan tempat ibadah
- Subsidi Harga sembako dan gas 3 kg
- Santunan Kematian Rp. 2 juta/jiwa

Sumber: *Bappeda Kota Bandung 2013*

Hal tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Kecamatan Cibeunying Kidul bersama *stakeholder* untuk turut mewujudkannya, berdasarkan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan Cibeunying Kidul untuk mengawal janji-janji politik Walikota Bandung dan Wakil Walikota Bandung terpilih, secara terkoordinasi bersama dengan Stakeholder di lingkungan Kecamatan Cibeunying Kidul dan Kota Bandung pada umumnya.

Demikian pula adanya Instruksi Walikota Bandung Nomor 002 Tahun 2013 tanggal 20 September 2013 tentang Rencana Aksi Menuju Bandung Juara telah mencanangkan 24 Kelompok Kerja meliputi 335 (tiga ratus tiga puluh lima) Program/Kegiatan untuk mewujudkan Bandung Juara atau unggul di bandingkan dengan Pemerintah Kota/Kabupaten lainnya di Indonesia, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung, adapun rincian Rencana Aksi Menuju Bandung Juara yang digagas oleh Walikota Bandung secara lengkap sebagaimana terlampir, adapun rekapitulasi jumlah kegiatan rencana aksi Bandung Juara adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Rencana Aksi Menuju Bandung Juara

| No. | KELOMPOK KERJA | JUMLAH KEGIATAN / RENCANA AKSI |
|-----|--|--------------------------------|
| 1 | KELOMPOK KERJA KEMACETAN BANDUNG | 24 |
| 2 | KELOMPOK KERJAPEDAGANG KAKI LIMA | 11 |
| 3 | KELOMPOK KERJA SAMPAH BANDUNG | 18 |
| 4 | KELOMPOK KERJA BANDUNG HIJAU | 30 |
| 5 | KELOMPOK KERJA BANDUNG AMAN (MASALAH SOSIAL) | 11 |
| 6 | KELOMPOK KERJA BANJIR BANDUNG | 7 |

| No. | KELOMPOK KERJA | JUMLAH KEGIATAN / RENCANA AKSI |
|---------------|--|--------------------------------|
| 7 | KELOMPOK KERJA KOTA KREATIF BANDUNG | 16 |
| 8 | KELOMPOK KERJA BANDUNG KOTA BUDAYA | 15 |
| 9 | KELOMPOK KERJA BANDUNG SMART CITY | 13 |
| 10 | KELOMPOK KERJA KOLABORASI BANDUNG | 22 |
| 11 | KELOMPOK KERJA KAMPUNG JUARA | 21 |
| 12 | KELOMPOK KERJA REVITALISASI BANDUNG | 15 |
| 13 | KELOMPOK KERJA REFORMASI PENDIDIKAN | 14 |
| 14 | KELOMPOK KERJA PARIWISATA BANDUNG | 14 |
| 15 | KELOMPOK KERJA REFORMASI PASAR BANDUNG | 6 |
| 16 | KELOMPOK KERJA TAMAN TEMATIK | 21 |
| 17 | KELOMPOK KERJA BANDUNG KOTA MUSIK/FILM | 12 |
| 18 | KELOMPOK KERJA BANDUNG KOTA DESAIN | 15 |
| 19 | KELOMPOK KERJA INDEX KEBAHAGIAAN (INDEX OF HAPINNES) BANDUNG | 7 |
| 20 | KELOMPOK KERJA PUBLIC RELATION BANDUNG | 5 |
| 21 | KELOMPOK KERJA REFORMASI DEKRANASDA BANDUNG | 8 |
| 22 | KELOMPOK KERJA REFORMASI PKK BANDUNG | 9 |
| 23 | KELOMPOK KERJA KESEHATAN | 6 |
| 24 | KELOMPOK KERJA BANDUNG TO WTP | 15 |
| Jumlah | | 335 |

Sumber: *Bagian Orpad Setda Kota Bandung 2013*

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 bahwa Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 adalah "Terwujudnya sistem politik yang demokratis, Pemerintahan yang Desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta

keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Sedangkan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 yaitu Menetapkan Kebijakan Nasional dan Memfasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam upaya:

- a. Memperkuat Keutuhan NKRI, serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis;
- b. Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum;
- c. Memantapkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik;
- d. Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan antar kawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan;
- e. Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya; serta
- f. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis meliputi kajian fungsi, kedudukan, kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang.

RTRWK berfungsi sebagai:

- a. penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kota; serta

- b. acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota.

Kedudukan RTRWK yaitu sebagai pedoman bagi:

- a. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana rinci tata ruang kota, dan rencana sektoral lainnya;
- b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;
- c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan;
- d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- e. penataan ruang kawasan strategis kota.

Kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a. kebijakan dan strategi struktur ruang;
- c. kebijakan dan strategi pola ruang; dan
- d. kebijakan dan strategi kawasan strategis kota.

Kebijakan struktur ruang kota terdiri atas:

- a. perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional;
- b. pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali; dan
- c. peningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional.

Strategi untuk perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional meliputi:

- a. mengembangkan 2 (dua) PPK untuk wilayah Bandung Barat dan wilayah Bandung Timur
- b. membagi kota menjadi 8 (delapan) SWK, masing-masing dilayani oleh 1 (satu) SPK;
- c. mengembangkan pusat-pusat pelayanan lingkungan secara merata;
- d. menyediakan fasilitas yang memadai pada tiap pusat pelayanan sesuai skala pelayanannya; dan
- e. menyerasikan sebaran fungsi kegiatan pusat-pusat pelayanan dengan fungsi dan kapasitas jaringan jalan.

Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali meliputi:

- a. membuka peluang investasi dan kemitraan bagi sektor privat dan masyarakat dalam menyediakan prasarana dan sarana transportasi;
- b. mengawasi fungsi dan hirarki jalan;
- c. meningkatkan kapasitas jaringan jalan melalui pembangunan dan pelebaran jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas serta menghilangkan gangguan sisi jalan;
- d. memprioritaskan pengembangan sistem angkutan umum massal yang terpadu;
- e. menyediakan fasilitas parkir yang memadai dan terpadu dengan pusat-pusat kegiatan;
- f. mengembangkan sistem terminal dalam kota serta membangun

- terminal di batas kota dengan menetapkan lokasi yang dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah yang berbatasan; dan
- g. mengoptimalkan pengendalian dan penyelenggaraan sistem transportasi kota.

Kebijakan pola ruang kota terdiri atas:

- a. perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung;
- b. optimalisasi pembangunan wilayah terbangun.

Strategi untuk perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung meliputi:

- a. menjaga keseimbangan proporsi kawasan lindung khususnya di Kawasan Bandung Utara;
- b. mempertahankan dan menjaga hutan lindung sebagai kawasan hutan kota;
- c. mempertahankan dan merevitalisasi kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air dan kesuburan tanah serta melindungi kawasan dari bahaya longsor dan erosi;
- d. mengembangkan kawasan jalur hijau pengaman prasarana dalam bentuk jalur hijau sempadan sungai, jalur tegangan tinggi, dan jalur rel kereta api;
- e. mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada dan tidak memberi izin alih fungsi ke fungsi lain didalam mencapai penyediaan ruang terbuka hijau;
- f. melestarikan dan melindungi kawasan dan bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan, terhadap perubahan dan kerusakan struktur, bentuk, dan wujud arsitektural;
- g. meminimalkan dampak resiko pada kawasan rawan bencana.

Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanaan tata ruang sebagai wadah dimana perencanaan tersebut akan diimplementasikan, sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan. Dalam kebijakan Kebijakan struktur ruang kota untuk mewujudkan pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan, perencanaan yang berkaitan dengan pengembangan Bandung sebagai kota jasa menjadi perhatian penting.

Hal ini sejalan dengan perencanaan di tingkat Provinsi Jawa Barat berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Gubernur dengan Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Barat Nomor: 912/05/Bapp/2010, bahwa dalam Pendekatan Tematik Kewilayahan Kota Bandung bersama Kota Cimahi, Kab. Bandung Barat dan Kota Tasikmalaya termasuk dalam kota dengan tema pengembangan jasa perdagangan dan industri kreatif.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu- isu dan permasalahan pembangunan yang

dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung pada tahun 2013-2018 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kota Bandung. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain:

- 1) Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
- 2) Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
- 3) Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
- 4) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen.
- 5) Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kota Bandung yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung, sebagai berikut:

- 1) Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
- 2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
- 3) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.



- 4) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
- 5) Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kota Bandung dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Pemerintah Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut:

Tabel 3.1
Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung
dan Dinamika Lingkungan Strategis

| No. | Tupoksi | Isu Strategis |
|-----|---------|---|
| 1. | | <p>1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)</p> <p>Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu</p> |

| No. | Tupoksi | Isu Strategis |
|-----|---------|---|
| 2. | | <p>beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.</p> <p>Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan public, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.</p> <p>2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur</p> <p>Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (<i>services excelent</i>) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal <i>public services and public complaint</i>. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan <i>good governance</i>. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai ‘pelayan masyarakat’. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).</p> <p>Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Cibeunying Kidul dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan</p> |



| No. | Tupoksi | Isu Strategis |
|-----|---------|---|
| 3. | | <p>berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (<i>public service reform</i>) dalam rangka mewujudkan good governance.</p> <p>3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik</p> <p>Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (<i>good governance</i>) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsure pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.</p> <p>Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat umum sebagai <i>stakeholder</i>, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai <i>shareholder</i>.</p> <p>Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki <i>reward and punishment system</i>, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.</p> |
| 4. | | <p>4. Pengelolaan Keuangan dan Barang</p> <p>Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih</p> |

| No. | Tupoksi | Isu Strategis |
|-----|---------|---|
| | | <p>diarahkan kepada <i>entrepreneurial management</i> yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (<i>Performance Budget</i>), bukan pada kebijakan (<i>Policy Budget</i>).</p> <p>Sistem manajemen keuangan daerah (<i>financial management system</i>) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya <i>good governance</i> di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep <i>value for money</i> sehingga tercipta akuntabilitas publik (<i>public accountability</i>).</p> <p>Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu: perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah: (1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan; (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah; (3) Pengamanan barang daerah; (4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.</p> |

BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL KOTA BANDUNG

4.1 VISI

Untuk menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan harus dirumuskan suatu keadaan yang diinginkan organisasi untuk selanjutnya dituangkan dalam suatu visi yang berkaitan dengan kondisi masa depan yang penuh dengan perubahan dan ketidakpastian. Didalam perjalanan organisasi, visi memegang peran yang menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan sehingga organisasi dapat bergerak maju menuju masa depan lebih baik.

Visi yang tepat bagi masa depan suatu organisasi dapat menggerakkan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah, dan karena itu organisasi berkembang dan maju. Kekuatan visi harus mampu berperan sebagai perekat anggota organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.

Bagi suatu organisasi visi memiliki peran dan fungsi sebagai berikut: memberikan arah, menciptakan kesadaran untuk mengendalikan dan mengawasi (*sense of control*), mendorong anggota organisasi untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik (*Out-perform*), menggalakan anggota organisasi untuk bersaing, menciptakan daya dorong untuk perubahan dan mempersatukan anggota organisasi.

Bertitik tolak dari kewenangan tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu, maka merumuskan visi Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung yang mempunyai peran dan fungsi dalam menjembatani

keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan serta dapat menggerakkan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah sebagaimana diuraikan di atas, terutama dikaitkan dengan pelaksanaan pelimpahan kewenangan yang secara mutlak harus didukung oleh sumberdaya manusia aparatur yang mampu mengelola tugas-tugas pelayanan secara optimal, efektif dan efisien serta mampu merumuskan kebijakan-kebijakan bersifat implementatif yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat.

Untuk memenuhi harapan di atas, maka Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung akan berperan melaksanakan tugas umum pemerintahan, yang menjadi komitmen bersama mulai dari unsur pimpinan sampai dengan unsur pelaksana, yang selanjutnya dituangkan dalam pernyataan Visi sebagai berikut:

**TERWUJUDNYA OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK YANG
PROFESIONAL DI KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL TAHUN 2018**

Kecamatan merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Kota Bandung sehingga dalam setiap aktivitas, tujuan, dan sasarannya harus mengacu dan mendukung arah kebijakan Kota Bandung sesuai dengan visi Kota Bandung yang unggul, nyaman, dan sejahtera.

Dalam merumuskan visi ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan seperti Kondisi Wilayah, karakteristik masyarakat, kekhasan wilayah, berorientasi pada tupoksi kecamatan sebagai pelayan masyarakat, mampu menjadi sumber motivasi dan pedoman melaksanakan program dan kegiatan, mengakomodir semua kepentingan yang membentuk watak dan karakter khas suatu wilayah.

Dengan mempertimbangkan hal-hal diatas, maka rumusan visi Kecamatan Cibeunying Kidul secara rinci mengandung kata-kata kunci sebagai berikut:

1. Kecamatan Cibeunying Kidul

Kecamatan Cibeunying Kidul adalah salah satu Kecamatan di Kota Bandung.

2. Optimalisasi, mengandung makna:

op·ti·mal a (ter)baik; tertinggi; paling menguntungkan:

meng·op·ti·mal·kan: menjadikan paling baik; menjadikan paling tinggi;

peng·op·ti·mal·an n proses, cara, perbuatan mengoptimal-kan

(menjadikan paling baik, paling tinggi, prima dsb.)

3. Pelayanan Publik, mengandung makna:

Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. (dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas).

4. Profesional, mengandung makna:

Good governance (supremasi hukum, akuntabilitas, partisipatif, transparansi, kesetaraan), Kemampuan SDM aparat Kecamatan dan Kelurahan, Pemahaman aturan dan prosedur.

Jadi dengan Visi ini diharapkan terciptanya suatu tatanan pelayanan publik yang profesional dengan kemampuan Aparat Kecamatan dan Kelurahan dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mewujudkan masyarakat Cibeunying Kidul yang tertib, sehat, nyaman semua itu dilakukan untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dengan **Motto Juang “TERSENYUM” (TERtib, SEhat, NYaman Untuk Masyarakat).**

4.2 MISI

Dalam mewujudkan visi yang telah disepakati dan ditetapkan, disusun misi organisasi yang merupakan dasar/alasan keberadaan suatu organisasi serta bidang garapan suatu organisasi. Menurut *Kotler* bahwa misi merupakan pernyataan tentang tujuan organisasi yang diwujudkan dalam produk dan pelayanan. Dari batasan tersebut diatas ada beberapa hal yang diperhatikan dalam perumusan misi organisasi, meliputi: produk atau pelayanan yang ditawarkan, tingkat kebutuhan pelanggan akan produk atau pelayanan yang ditawarkan, memiliki sasaran yang akan dilayani, aspiratif terhadap keadaan yang diinginkan di masa mendatang.

Mengacu kepada uraian tersebut diatas, sebagai bentuk nyata dari visi organisasi yang telah ditetapkan, maka Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung merumuskan misi dan misi ini menggambarkan hal-hal yang harus terlaksana dalam mencapai visi tersebut, yaitu:

- 1. Mewujudkan pelayanan publik prima**
- 2. Meningkatkan kinerja Pemerintah Kecamatan Cibeunying Kidul secara efektif, transparan dan akuntabel**

Untuk dapat merealisasikan Visi dan Misi tersebut diatas, Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung sebagai unsur dari pemerintah Kota Bandung menentukan kualitas pelayanan publik Kota

yang didukung oleh aparatur Kecamatan dan Kelurahan dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya dituntut untuk:

1. Konsisten, yaitu suatu sikap dan perilaku aparatur yang tidak berubah terhadap suatu kesepakatan dalam implementasi kebijakan. Nilai Konsisten bagi aparatur merupakan hal yang sangat penting, karena Inkonsistensi akan menyebabkan tidak dapat diterapkannya standar-standar pelayanan yang harus dipedomani, yang pada akhirnya akan menghambat mekanisme penyelenggaraan pemerintahan;
2. Kreatif, yaitu setiap anggota organisasi harus mempunyai kemampuan dalam melakukan terobosan-terobosan sebagai upaya meningkatkan pelayanan dalam mendayagunakan kewenangan serta dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pelayanan dengan tetap berpegang kepada koridor dan normatif yang ada, mengingat arus perkembangan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi berlangsung sangat cepat;
3. Objektif, yaitu dalam melakukan pemecahan masalah dalam tugas dan pelayanan didasarkan atas data dan informasi sehingga perumusan kebijakan dan keputusan pelayanan yang dihasilkan mampu menjawab permasalahan yang ada. Dalam hal pemberian pelayanan kepada masyarakat harus berlandaskan kepada norma dan standar yang berlaku dengan tidak membeda-bedakan pelayanan secara parsial sehingga dapat menciptakan tertib dan optimalisasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan dan Kelurahan;
4. Loyalitas, yaitu setiap anggota organisasi harus memiliki integritas, disiplin dan pengabdian yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta dalam mengemban visi dan misi organisasi dengan berorientasi kepada kredibilitas dan kapabilitas individu, sehingga optimalisasi pencapaian hasil yang diharapkan dapat terwujud.

Dengan adanya konsistensi, kreatif, objektif dan loyalitas di dalam segenap aparatur di lingkungan Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung diharapkan dapat serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai unsur staf dalam merumuskan kebijakan Pimpinan serta melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

4.3 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan tujuan ini Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan Sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Sasaran Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.

Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan yang akan dicapai untuk mewujudkan 2 (dua) misi Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung adalah sebanyak 3 (tiga) tujuan dan 3 (tiga) sasaran, tujuan dan sasaran pada masing-masing misi sebagai berikut:

Tujuan Misi 1:

1. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan.

Sasaran:

- Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan dan kelurahan
2. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan.

Sasaran:

- Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan

Tujuan Misi 2:

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja

Sasaran:

- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Secara terperinci, tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 4.1

TUJUAN RENSTRA KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL

| Misi | Tujuan |
|--|---|
| 1. Mewujudkan pelayanan publik prima | 1. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan |
| | 2. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan. |
| 2. Meningkatkan kinerja Pemerintah Kecamatan Cibeunying Kidul secara efektif, transparan dan akuntabel | 3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja |

Tabel 4.2

TABEL SASARAN RENSTRA KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL

| Tujuan | Sasaran |
|--|---|
| 1. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan dan Kelurahan | 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan dan kelurahan |
| 2. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan | 2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan (TUP) Kecamatan |
| 3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja | 3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja |

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana/ instrumen pengukuran, jumlah indikator kinerja untuk mencerminkan pencapaian dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan capaian sasaran dalam Rencana Strategis Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung adalah sebanyak 5 (lima) indikator. Indikator pada masing-masing untuk menunjukkan pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:



Tabel 4.3

**Indikator Sasaran dan Sasaran Jangka Menengah
Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung**

| Sasaran | Indikator Kinerja |
|---|--|
| 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan dan kelurahan | 1. Indeks Pelayanan/ Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) |
| 2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan (TUP) Kecamatan | 2. Capaian Kinerja Tugas Umum Pemerintahan |
| 3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja | 3. Nilai AKIP Kecamatan Cibeunying Kidul |
| | 4. Ditindaklanjutinya seluruh temuan BPK dan Inspektorat |
| | 5. Tertib administrasi barang/asset daerah di Kecamatan |

Untuk menggambarkan hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, **diperlukan data dan informasi yang relevan** dengan hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung secara memadai, serta **menetapkan target kinerja tujuan dan sasaran yang optimal dan terukur (kuantitatif maupun kualitatif)** serta merencanakan tahapan pencapaian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan kemampuan, dengan demikian Sekretariat Daerah Kota Bandung sedang **merencanakan keberhasilan bukan merencanakan kegagalan**. Uraian tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung pada periode Tahun 2013-2018, secara rinci diuraikan pada tabel berikut:

TABEL 4.4

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung Tahun 2013-2018

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA PADA TAHUN KE- | | | | |
|-----|---|---|---|-------------------------------|------|------|------|------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. | Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan dan Kelurahan | 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan dan kelurahan | 1. Indeks Pelayanan/ Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | B | B | B | A | A |
| 2. | Meningkatkanki nerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan | 2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan (TUP) Kecamatan | 2. Capaian Kinerja Tugas Umum Pemerintahan | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,90 | 1,00 |
| 3. | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja | 3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja | 3. Nilai AKIP Kecamatan Cibeunying Kidul | CC | CC | B | B | A |
| | | | 4. Ditindaklanjuti nya seluruh temuan BPK dan Inspektorat | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | 5. Tertib administrasi barang/asset daerah di Kecamatan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |



Bahwa target kinerja Kecamatan terkait dengan Tugas Umum Pemerintahan (TUP) merupakan target akumulasi dari 5 (lima) bidang atau seksi dalam lingkup Pemerintah Kecamatan, rincian target pada tiap bidang/seksi adalah sebagaimana tabel berikut :

TABEL 4.5

| | | | | | | | |
|--|---|---|-----|------|-----|-----|---|
| Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan | Capaian Kinerja Tugas Umum Pemerintahan | Bidang pemerintahan | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1 |
| | | Bidang perekonomian, Pembangunan, Lingkungan Hidup, | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1 |
| | | Bidang Pendidikan dan kemasyarakatan | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1 |
| | | Bidang ketentraman dan ketertiban | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1 |
| | | Bidang pelayanan | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1 |

Tugas Umum Pemerintahan (TUP) Kecamatan sebagaimana diamanatkan dalam PP 19 Tahun 2007 tentang Kecamatan dan atau berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, sampai saat ini belum ada alat ukur atau instrument pengukuran yang dikembangkan secara khusus untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaannya, sehingga diperlukan alat ukur/*instrument/tools* pengukuran kinerja TUP Kecamatan.

Pasal 15

- (1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:
- a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. pengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
 - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya

Dalam kerangka akuntabilitas kinerja pengukuran kinerja Tugas Umum Pemerintahan (TUP) Kecamatan dapat dilakukan dengan metoda pengukuran secara terstruktur untuk mengetahui capaian kinerja berdasarkan bidang tugas atau Kepala Seksi yang ada di Kecamatan Cibeunying Kidul dan selanjutnya dapat diakumulasi untuk mengetahui capaian kinerja TUP pada tingkat Kecamatan.

Alat ukur (*Tools*) yang dikembangkan untuk mengukur TUP Kecamatan berupa tabel pengukuran yang terdiri dari kolom isian dan perhitungan yang meliputi:

1. Bidang Tugas Umum Pemerintahan/sesuai jumlah Kepala Seksi pada Kecamatan
2. Indikator Kinerja (Outcome) Program/Kegiatan
3. Jumlah Indikator kegiatan pada setiap bidang/Kasi (pembagi)
4. Target kinerja Kegiatan Kepala Seksi Kecamatan/Kelurahan
5. Satuan Indikator Kinerja

6. Capaian Kinerja Tahun berkenaan
7. Hasil perbandingan capaian kinerja dengan target kinerja
8. perbandingan capaian kinerja dengan nilai pembagi (jumlah indicator pada setiap TUP)
9. Akumulasi Capaian Kinerja Kepala Seksi (= \sum tiap bidang)
10. Penjumlahan seluruh bidang/Kasi (\sum Seluruh bidang)
11. Prosentase perbandingan \sum nilai kinerja seluruh bidang dengan jumlah bidang tugas/seksi yang di ukur

Berdasarkan uraian Tabel **Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung 2013-2018 tersebut diatas dapat menunjukkan gambaran hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.** Pernyataan Tujuan dan sasaran ditunjukkan dengan target capaian kinerja terukur (kuantitatif maupun kualitatif) yang direncanakan pencapaiannya melalui target kinerja sasaran tahunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Dalam rangka memenuhi kinerja sasaran setiap tahun tersebut diperlukan cara untuk mencapainya, cara mencapai sasaran berbentuk strategi dan kebijakan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang mendukung dan menghambat pencapaiannya, untuk itu dilakukan analisis lingkungan internal dan eksternal sehingga diperoleh formulasi strategi dan kebijakan yang tepat di lingkungan Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung.

4.4 Strategi dan Kebijakan Kecamatan Cibeunying Kidul

Dalam rangka pencapaian visi dan misi secara efektif dan efisien maka dianalisis faktor-faktor yang dianggap dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalannya dengan memperhitungkan nilai – nilai

yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi lingkungannya.

a. Kekuatan (*Strength*)

Faktor-faktor kekuatan tersebut antara lain :

1. Adanya komitmen untuk memberikan pelayanan prima ditingkat kecamatan dan kelurahan.
2. Adanya rencana kerja yang sistematis sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan
3. Tersedianya dukungan anggaran dari APBD yang berkesinambungan.
4. Tersedianya sarana & prasarana kerja. Fasilitas ini menyangkut gedung dan ruangan kantor, peralatan kantor (baik perangkat keras maupun perangkat lunak).

b. Kelemahan (*Weakness*)

Faktor-faktor kelemahan tersebut antara lain:

1. Pelayanan kepada masyarakat belum optimal.
2. Sarana & Prasarana kerja yang belum memadai dalam menunjang kegiatan sehari-hari.
3. Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur yang belum memadai.
4. Lemahnya koordinasi dengan instansi terkait.
5. Disiplin dan tanggung jawab pegawai masih belum sesuai dengan aturan kepegawaian.
6. Pemeliharaan sarana & prasarana belum optimal, kuantitasnya masih kurang, kualitasnya sudah menurun.

c. Peluang (*Opportunity*)

Faktor-faktor peluang tersebut antara lain :

1. Adanya pelimpahan sebagian kewenangan Walikota Bandung kepada Camat.
2. Adanya dukungan dari Lembaga / Organisasi Kemasyarakatan dan partisipasi masyarakat cukup tinggi.
3. Adanya pelaku ekonomi kecil, menengah, dan besar.
4. Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur.
5. Adanya alokasi dana bergulir dari Pemerintah.
6. Adanya peraturan-peraturan sebagai payung hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsi kecamatan.

d. Ancaman (*Threatness*)

Faktor-faktor ancaman tersebut antara lain :

1. Banyaknya jumlah penduduk berdampak pada banyaknya jumlah pengangguran.
2. Menurunnya kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah.
3. Rendahnya daya beli masyarakat.
4. Merebaknya Pedagang Kaki Lima.
5. Lemahnya sistem pemasaran hasil produksi dari masyarakat.
6. Masyarakat masih lemah dalam pemahaman aturan aturan yang ada.

Dengan melihat faktor-faktor SWOT diatas maka dapat diidentifikasi beberapa faktor kunci keberhasilan yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung, adalah terdiri dari:



1. Terpenuhinya sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan secara optimal dalam melaksanakan pekerjaan sehari hari.
2. Adanya dukungan dana yang memadai dan berkesinambungan.
3. Adanya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah.
4. Adanya Sumber Daya Aparatur yang Memadai dan memiliki komitmen yang kuat terhadap tujuan organisasi serta memiliki dedikasi dan integritas tinggi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.
5. Terjalannya koordinasi yang baik dengan Instansi terkait dan Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan.
6. Adanya standar kerja untuk memacu peningkatan kinerja pegawai.
7. Mengembangkan sistem reward dan punishment untuk meningkatkan kinerja aparatur.
8. Terjalannya kerja sama yang baik dengan lembaga formal dan non formal serat sektor swasta.
9. Adanya kepemimpinan yang memiliki kemampuan manajerial yang baik serta mampu memberikan motifasi dan menjadi penggerak serta membuat suasana dinamis bagi bawahan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dikemukakan pilihan strategi implementatif dan hal-hal yang dapat dijadikan model kebijakan oleh Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung dalam melaksanakan pelayanannya. Strategi dan Kebijakan yang ditetapkan akan menjadi bahan penyusunan program dan kegiatan yang tepat dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung dalam periode 2013-2018, sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 4.6

**Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis
Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung**

| Sasaran | Strategi | Kebijakan |
|---|---|---|
| 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan dan kelurahan | Mengoptimalkan Sistem manajemen mutu untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat (ST) | Meningkatkan Peran kecamatan dan kelurahan |
| 2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan (TUP) Kecamatan | Mengoptimalkan anggaran untuk meningkatkan kinerja aparatur (SO) | |
| 4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja | Memanfaatkan koordinasi dengan instansi pemerintah Kota untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dan meningkatkan pemahaman terhadap pengelolaan Barang/Aset Daerah (WO) | Mengembangkan manajemen akuntabilitas kinerja dan pemahaman terhadap pengelolaan Barang/Aset Daerah |

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang dirumuskan Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung tersebut di atas akan dijabarkan melalui program dan kegiatan serta masukan (*input*) yang relevan dan memadai, sehingga sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan



efisien, hal ini memberikan gambaran bahwa pada dasarnya program adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Untuk lebih jelasnya mengenai rencana program, rencana kegiatan, rencana indikator kegiatan sesuai dengan kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dalam kurun waktu 5 (lima) tahun selama periode tahun 2013-2018, akan dikemukakan pada bab selanjutnya.

BAB V**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Peran strategis Kecamatan di Kota Bandung menuntut adanya peningkatan pelayanan public ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan upaya: *re-engineering*, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredisain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan,

sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program. Dari setiap strategi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas terhadap sistem operasional dan aktivitas organisasi.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Cibeunying Kidul pada periode 2013-2018. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya factor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan public lainnya, sehingga perlu adanya reviu rencana strategis oleh manajemen puncak beserta *stakeholder* secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Reviu rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja SKPD, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak



pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil reviu renstra menunjukkan tingginya komitmen SKPD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dalam rangka pencapaian 3 (tiga) tujuan dan 3 (tiga) sasaran kinerja Kecamatan Cibeunying Kidul periode tahun 2013–2018 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung 2013-2018

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit Kerja SKPD Penanggung jawab | Lokasi |
|--|--|--|-----------------|--|---|--|---|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|--|----------------|----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 | | Tahun-2 | | Tahun-3 | | Tahun-4 | | Tahun-5 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2018) | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan | Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan dan kelurahan | Indeks Pelayanan/ Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 1.20.1.20.18.30 | Program Peningkatan Peran Kecamatan & Kelurahan | Indeks Pelayanan/ Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | B | B | 4.474.831.000 | B | 3.970.831.000 | B | 4.367.914.100 | A | 4.804.705.510 | A | 5.285.176.061 | A | 22.903.457.671 | | Wilayah Kecamatan Cibeunying Kidul |



| Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan. | Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan (TUP) Kecamatan | Capaian Kinerja Tugas Umum Pemerintahan | | | Capaian Kinerja Tugas Umum Pemerintahan | 70% | | 70% | 75% | | 80% | | 90% | | 100% | | 100% | | | |
|---|--|---|--|--|--|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|------|---------------|------|---------------|--|--|------------------------------------|
| | | | | Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | % hasil musrenbang yang direalisasi, Panjang Panjang Drainage jalan protokol, Kerb dan trotoar dalam kondisi baik (telah dicat dan terpelihara),Jumlah RW se Kecamatan yang terbina melalui program Bandung Green and Clean (BGC), Jumlah sungai dan anak sungai yg telah dilakukan program Kali Bersih,Jumlah tempat Ibadah dan Rumah Kumuh yg menerima bantuan,Jumlah Sumur Resapan, lubang biopori dan jumlah pohon produktif yang ditanam. | 70% | 1.026.805.000 | 75% | 1.026.805.000 | 80% | 1.129.485.500 | 90% | 1.242.434.050 | 100% | 1.366.677.455 | 100% | 5.792.207.005 | | | Wilayah Kecamatan Cibeunying Kidul |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|---------------|------|----------------|------|---------------|--|------------------------------------|
| | | | | Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan | Terbinanya Koperasi dan UKM di Wilayah Kecamatan Cibeunying Kidul, Tersedianya data dan informasi tentang UKM/perusahaan dan Koperasi di wilayah Kecamatan Cibeunying Kidul, Terfasilitasinya kegiatan PNPM di Wilayah Kecamatan Cibeunying Kidul | | 70% | 89.187.000 | 75% | 89.187.000 | 80% | 98.105.700 | 90% | 107.916.270 | 100% | 118.707.897 | 100% | 503.103.867 | | Wilayah Kecamatan Cibeunying Kidul |
| | | | | Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan | Fasilitasi keg Bidang seni Budaya, Olah raga, pendidikan dan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Jumlah LPM Aktif, Jumlah Forum RW aktif se Kecamatan,% Peningkatan swadaya murni bidang sosial kemasyarakatan, Jumlah lembaga keagamaan tingkat Kecamatan dan Kelurahan yg aktif, Jumlah TP-PKK dan Pok PKK aktif se kecamatan, Jumlah posyandu aktif se Kecamatan, Jumlah Karang Taruna Kecamatan dan kelurahan Aktif. | | 70% | 993.599.000 | 75% | 849.599.000 | 80% | 934.558.900 | 90% | 1.028.014.790 | 100% | 1.1130.816.269 | 100% | 4.936.587.959 | | Wilayah Kecamatan Cibeunying Kidul |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|------|---------------|------|----------------|------------------------------------|
| | | | | Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Penurunan jumlah kejadian gangguan ketentraman / ketertiban dalam masyarakat , Penurunan Jumlah PKL di Zona Merah, Jumlah PKL terbina di Zona Kuning dan Hijau, Jumlah PKL tertata di Zona Kuning dan Hijau, Jumlah Anggota Linmas Aktif , Jumlah Anggota Satwankar Aktif , Jumlah Pos kamling dan Siskamling aktif , Jumlah RW yang memiliki sarana pemadam kebakaran portable (APAR) atau tradisional. | 70% | 411.000.000 | 75% | 61.000.000 | 80% | 67.100.000 | 90% | 73.810.000 | 100% | 81.191.000 | 100% | 694.101.000 | Wilayah Kecamatan Cibeunying Kidul |
| | | | | Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan | Terfasilitasinya Program dan kegiatan pada tingkat RW, Jumlah Kelurahan Tertib Administrasi , Jumlah RW dan RT Tertib Administrasi se Kecamatan, % Pelayanan adm. Pertanahan , % surat keterangan ahli waris tepat waktu, | 70% | 1.867.475.000 | 75% | 1.867.475.000 | 80% | 2.054.222.500 | 90% | 2.259.644.750 | 100% | 2.485.609.225 | 100% | 10.534.426.475 | Wilayah Kecamatan Cibeunying Kidul |
| | | | | Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat | % Fasilitasi Pelayanan adm. Kependudukan Tepat waktu pelayanan (sesuai SOP), % Pelayanan adm. Umum lainnya Tepat waktu (Sesuai SOP) | 70% | 86.765.000 | 75% | 76.765.000 | 80% | 84.441.500 | 90% | 92.885.650 | 100% | 102.174.215 | 100% | 443.031.365 | Wilayah Kecamatan |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|----|---|---|--------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|--|--------------------------|
| | | | | Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) | | NA | - | - | Sedang | 10.500.000.000 | Sedang | 11.550.000.000 | Tinggi | 12.705.000.000 | Tinggi | 13.975.500.000 | Tinggi | 48.730.500.000 | | Wilayah Kelurahan |
| | | | | Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK | Bantuan 100 jt PKK/kelurahan/tahun : | | | | | 600.000.000 | 6 Kelurahan | 660.000.000 | 6 Kelurahan | 726.000.000 | 6 Kelurahan | 798.600.000 | 6 Kelurahan | 2.784.600.000 | | Wilayah Kelurahan |
| | | | | Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna | Bantuan 100 jt/karang taruna kelurahan/ tahun: | | | | | 600.000.000 | 6 Kelurahan | 660.000.000 | 6 Kelurahan | 726.000.000 | 6 Kelurahan | 798.600.000 | 6 Kelurahan | 2.784.600.000 | | Wilayah Kelurahan |
| | | | | Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM | Bantuan 100 jt/LPM kelurahan/ tahun : | | | | | 600.000.000 | 6 Kelurahan | 660.000.000 | 6 Kelurahan | 726.000.000 | 6 Kelurahan | 798.600.000 | 6 Kelurahan | 2.784.600.000 | | Wilayah Kelurahan |
| | | | | Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW | Bantuan 100 jt /RW/ tahun : | | | | | 8.700.000.000 | 87 RW | 9.570.000.000 | 87 RW | 10.527.000.000 | 87 RW | 11.579.700.000 | 87 RW | 40.376.700.000 | | Wilayah Kelurahan |



| Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja | Nilai AKIP Kecamatan Cibeunying Kidul | 1.20.1.20.18.06 | Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Penilaian Lakip SKPD oleh Inspektorat/Kemenpan | CC | 17.040.000 | CC | 22.000.000 | B | 24.200.000 | B | 26.620.000 | A | 29.282.000 | A | 119.142.000 | Wilayah Kec. Cibeunying Kidul | |
|------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------|--|--|------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | N/A | | | | 100% | | | | | | | | | | | | | 100% |
| | | Ditindaklanjuti seluruh temuan BPK dan Inspektorat | 1.20.1.20.18.06.01 | Kegiatan : 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | - Renstra - Renja - Lakip | | 3 Dokumen | 5.000.000 | 2 Dokumen | 7.000.000 | 2 Dokumen | 7.700.000 | 2 Dokumen | 8.470.000 | 2 Dokumen | 9.317.000 | 11 Dokumen | 37.487.000 | Wilayah Kec. Cibeunying Kidul |
| | | Tertib administrasi barang/asset daerah di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------------|---|--|--|--|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|--|--|-------------------------------|
| | | | 1.20.1.20. 18.06.04 | 3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Tersedianya Laporan Keuangan Kecamatan | | | 1 Dok | 8.355.000 | 1 Dok | 10.000.000 | 1 Dok | 11.000.000 | 1 Dok | 12.100.000 | 1 Dok | 13.310.000 | 5 Dok | 54.765.000 | | | Wilayah Kec. Cibeunying Kidul |
| | | | 1.20.1.20. 18.05 | Program : Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur | Persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang. | | | 80% | 83.625.000 | 80% | 85.000.000 | 85% | 93.500.000 | 85% | 102.850.000 | 85% | 113.135.000 | 85% | 478.110.000 | | | Wilayah Kec. Cibeunying Kidul |
| | | | 1.20.1.20. 18.05.04 | Kegiatan : Pembinaan Kinerja Aparatur | Terlaksananya Pembinaan Aparatur Kecamatan dan Kelurahan | | | 60 Org | 83.625.000 | 60 Org | 85.000.000 | 60 Org | 93.500.000 | 60 Org | 102.850.000 | 60 Org | 113.135.000 | 60 Org | 478.110.000 | | | Wilayah Kec. Cibeunying Kidul |
| | | | 1.20.1.20. 18.03 | Program : Peningkatan Disiplin Aparatur | Tingkat Disiplin Aparatur | | | 90% | 72.400.000 | 90% | 51.400.000 | 90% | 56.540.000 | 90% | 62.194.000 | 90% | 68.413.400 | | 310.947.400 | | | Wilayah Kec. Cibeunying Kidul |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------------|--|---|--|--|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|-------------|--|-------------------------------|
| | | | 1.20.1.20. 18.01.09 | 4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Terpeliharanya peralatan kerja | | | 12 bulan | 11.805.000 | 12 bulan | 13.000.000 | 12 bulan | 14.300.000 | 12 bulan | 15.730.000 | 12 bulan | 17.303.000 | 12 bulan | 72.138.000 | | Wilayah Kec. Cibeunying Kidul |
| | | | 1.20.1.20. 18.01.10 | 5. Penyediaan Alat tulis kantor | Tersedianya kebutuhan ATK dan Materai | | | 12 bulan | 23.745.000 | 12 bulan | 26.500.000 | 12 bulan | 29.150.000 | 12 bulan | 32.065.000 | 12 bulan | 35.271.500 | 12 bulan | 146.731.500 | | Wilayah Kec. Cibeunying Kidul |
| | | | 1.20.1.20. 18.01.11 | 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Tersedianya kebutuhan cetakan dan penggandaan | | | 12 bulan | 21.530.000 | 12 bulan | 23.042.000 | 12 bulan | 25.346.200 | 12 bulan | 27.880.820 | 12 bulan | 30.668.902 | 12 bulan | 128.467.922 | | Wilayah Kec. Cibeunying Kidul |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------------|---|--|--|--|----------|-------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|-------------|--|-------------------------------|
| | | | 1.20.1.20. 18.01.12 | 7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Tersedianya kebutuhan penerangan kantor | | | 12 bulan | 10.550.000 | 12 bulan | 11.605.000 | 12 bulan | 12.765.500 | 12 bulan | 14.042.050 | 12 bulan | 15.446.255 | 12 bulan | 64.408.805 | | Wilayah Kec. Cibeunying Kidul |
| | | | 1.20.1.20. 18.01.13 | 8. Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai | | | 12 bulan | 110.600.000 | 12 bulan | 70.600.000 | 12 bulan | 77.660.000 | 12 bulan | 85.426.000 | 12 bulan | 93.968.600 | 12 bulan | 438.254.600 | | Wilayah Kec. Cibeunying Kidul |
| | | | 1.20.1.20. 18.01.14 | 9. Penyediaan peralatan rumah tangga | Tersedianya kebutuhan peralatan rumah tangga | | | 12 bulan | 23.500.000 | 12 bulan | 26.000.000 | 12 bulan | 28.600.000 | 12 bulan | 31.460.000 | 12 bulan | 34.606.000 | 12 bulan | 144.166.000 | | Wilayah Kec. Cibeunying Kidul |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------------|--|---|--|--|--|--|----------|-------------|----------|------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------------------------|
| | | | 1.20.1.20. 18.01.15 | 10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Tersedianya kebutuhan surat kabar, majalah, buku-buku | | | | | 12 bulan | 12.520.000 | 12 bulan | 14.000.000 | 12 bulan | 15.400.000 | 12 bulan | 16.940.000 | 12 bulan | 18.634.000 | 12 bulan | 77.494.000 | Wilayah Kec. Cibeunying Kidul |
| | | | 1.20.1.20. 18.01.17 | 11. Penyediaan makanan dan minuman | Tersedianya kebutuhan akan makan dan minum rapat dan tamu | | | | | 12 bulan | 40.207.000 | 12 bulan | 44.000.000 | 12 bulan | 48.400.000 | 12 bulan | 53.240.000 | 12 bulan | 58.564.000 | 12 bulan | 244.411.000 | Wilayah Kec. Cibeunying Kidul |
| | | | 1.20.1.20. 18.01.18 | 10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Tersedianya kebutuhan untuk rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah | | | | | 12 bulan | 121.875.000 | 12 bulan | 98.000.000 | 12 bulan | 107.800.000 | 12 bulan | 118.580.000 | 12 bulan | 130.438.000 | 12 bulan | 576.693.000 | Wilayah Kec. Cibeunying Kidul |



GEMAH RIPAH WIBAWA MUKTI

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------------|--|--|--|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|---------------|--|--|--|--------------------------------------|
| | | | 1.20.1.20. 18.02.12 | Pengadaan perlengkapan peralatan aparatur | Tersedianya perlengkapan peralatan aparatur | | 1 kecamatan dan 6 Kelurahan | 183.950.000 | 1 kecamatan dan 6 Kelurahan | 110.000.000 | 1 kecamatan dan 6 Kelurahan | 121.000.000 | 1 kecamatan dan 6 Kelurahan | 133.100.000 | 1 kecamatan dan 6 Kelurahan | 146.410.000 | 1 kecamatan dan 6 Kelurahan | 694.460.000 | | | | Wilayah Kec. Cibeunying Kidul |
| | | | 1.20.1.20. 18.02.22 | Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor | Terpeliharanya gedung kantor Kecamatan Cibeunying Kidul yang memadai untuk melayani masyarakat | | | | | 400.000.000 | 1 kecamatan dan 6 Kelurahan | 440.000.000 | 1 kecamatan dan 6 Kelurahan | 484.000.000 | 1 kecamatan dan 6 Kelurahan | 532.400.000 | 1 kecamatan dan 6 Kelurahan | 1.856.400.000 | | | | Wilayah Kec. Cibeunying Kidul |
| | | | 1.20.1.20. 18.02.24 | Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional | Terpeliharanya kendaraan dinas operasional yang layak pakai | | 1 kecamatan dan 6 Kelurahan | 457.688.000 | 1 kecamatan dan 6 Kelurahan | 515.768.000 | 1 kecamatan dan 6 Kelurahan | 567.344.800 | 1 kecamatan dan 6 Kelurahan | 624.079.280 | 1 kecamatan dan 6 Kelurahan | 686.487.208 | 1 kecamatan dan 6 Kelurahan | 2.851.367.288 | | | | Wilayah Kec. Cibeunying Kidul |



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|------------------------|---|--|--|-----------------------------|-----------------------|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | | 1.20.1.20.18.02.42 | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | Meningkatnya kuitas bangunan kantor agar menjadi bangunan yang representatif untuk melayani masyarakat | | 1 kecamatan dan 6 Kelurahan | 636.000.000 | | | | | 1 kecamatan dan 6 Kelurahan | 636.000.000 | Wilayah Kec. Cibeunying Kidul |
| | | | 1.20.1.20.18.23 | Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi | Jumlah aplikasi teknologi informasi | | | 148.700.000 | | | | | 1 kecamatan dan 6 Kelurahan | 148.700.000 | Wilayah Kec. Cibeunying Kidul |
| | | | 1.20.1.20.18.23.01 | Kegiatan : Penyusunan Sistem Informasi terhadap layanan publik | Tersedianya Sistem Informasi terhadap layanan publik | | 1 kecamatan dan 6 Kelurahan | 148.700.000 | | | | | 1 kecamatan dan 6 Kelurahan | 148.700.000 | Wilayah Kec. Cibeunying Kidul |
| JUMLAH PAGU ANGGARAN | | | | | | | | 6.874.800.000 | | | | | 1 kecamatan dan 6 Kelurahan | 148.700.000 | Wilayah Kec. Cibeunying Kidul |
| | | | | | | | | 16.450.000.000 | | | | | 1 kecamatan dan 6 Kelurahan | 148.700.000 | Wilayah Kec. Cibeunying Kidul |
| | | | | | | | | 18.095.000.000 | | | | | 1 kecamatan dan 6 Kelurahan | 148.700.000 | Wilayah Kec. Cibeunying Kidul |
| | | | | | | | | 19.904.500.000 | | | | | 1 kecamatan dan 6 Kelurahan | 148.700.000 | Wilayah Kec. Cibeunying Kidul |
| | | | | | | | | 21.894.950.000 | | | | | 1 kecamatan dan 6 Kelurahan | 148.700.000 | Wilayah Kec. Cibeunying Kidul |
| | | | | | | | | 83.219.250.000 | | | | | 1 kecamatan dan 6 Kelurahan | 148.700.000 | Wilayah Kec. Cibeunying Kidul |

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dirinci program-program utama yang mendukung secara langsung pencapaian kinerja utama Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung berdasarkan 3 (tiga) sasaran yang telah ditetapkan, meliputi 2 (dua) program dan 9 (sembilan) kegiatan indikatif, sebagai berikut:

Tabel 5.2
PROGRAM DAN KEGIATAN

| Sasaran | Program | Kegiatan |
|--|---|--|
| (1) | (2) | (3) |
| Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan dan kelurahan | Program : Peningkatan Peran Kecamatan & Kelurahan | Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan |
| | | Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan |
| | | Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan |
| | | Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan |
| | | Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan |
| | | Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat |
| Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan (TUP) Kecamatan | | |
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja | Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD |
| | | Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran |
| | | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun |

BAB VI
INDIKATOR KINERJA
KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL KOTA BANDUNG YANG MENGACU
PADA SASARAN RPJMD

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5(lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja SKPD dengan pemerintah, dan SKPD akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LAKIP tahunan dan LAKIP lima tahunan pada akhir masa jabatan kepala daerah.

Indikator Kinerja Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Cibeunying Kidul untuk mewujudkannya sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung yaitu:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan dan kelurahan
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung dan target kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2013-2018 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 6.1

Indikator kinerja Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD2013-2018

| NO | Sasaran | Indikator RPJMD | Indikator | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|----|--|---|--|---|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|--|
| | | | | Tahun 2013 | Tahun 2014 | Tahun 2015 | Tahun 2016 | Tahun 2017 | Tahun 2018 | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Indeks Pelayanan/ Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | B | B | B | B | A | A | A |
| 2 | Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi | 2. Nilai evaluasi AKIP | Nilai AKIP Kecamatan Cibeunying Kidul | CC | CC | CC | B | B | A | A |
| | | 3. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah | Ditindaklanjuti seluruh temuan BPK dan Inspektorat | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | 4. SKPD yang mendapat temuan penyimpangan material/administrasi | Tertib administrasi barang/asset daerah di Kecamatan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

BAB VII

PENUTUP

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Cibeunying Kidul sebagai salah satu unit kerja yang strategis dan menunjang pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Bandung, maka rencana strategis Kecamatan Cibeunying Kidul merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi Pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung.

Visi Kecamatan Cibeunying Kidul sebagai dasar pertimbangan dengan misi yang tercermin dalam tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sampai dengan tahun 2018, serta dapat dijadikan acuan kebijakan teknis oleh seluruh Aparatur Kecamatan dan kelurahan, serta masyarakat di Kecamatan Cibeunying Kidul.

Rencana strategis Kecamatan Cibeunying Kidul akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh aparatur dan masyarakat serta adanya sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa.

Penting untuk diketahui bahwa hasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang memerlukan *political will* pimpinan organisasi.

Demikian semoga rencana strategis Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung sampai dengan tahun 2018 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kecamatan Cibeunying Kidul.

Bandung, 2014
Camat Cibeunying Kidul

Drs. Denny Sany, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650810 198603 1 024